

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Deskripsi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2019 cenderung meningkatkan. **Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp 4.618.521.099.425 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor terkecil terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 2.944.639.939.900, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 428.852.346.450 namun tingkat ketercapaian tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh tidak tercapainya target BBN I.**
2. **Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pajak daerah terbesar pada tahun 2015 sebesar 39,18% dan terkecil pada 2017 sebesar 32,97% dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,60%, sedangkan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2019 dalam kondisi yang tetap stabil,**

Rata-rata kontribusi Pajak Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2015 – 2019 sebesar 99%.

- 3. Efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem penagihan D2D tergolong kurang efektif berdasarkan realisasi lembar sebesar 21,77% dan berdasarkan nominal sebesar 20,93%, sedangkan melalui sistem penagihan CR juga tergolong kurang efektif. Berdasarkan realisasi obyek pajak sebesar 37,25% dan berdasarkan nominal sebesar 36,17%, sehingga masih diperlukan banyak evaluasi terhadap kedua sistem tersebut agar dapat tergolong efektif dalam penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.**
- 4. Tunggakan pajak kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -32,90% dengan rata-rata tunggakan pajak sebesar 15,20%. Peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor disebabkan berbagai faktor, namun penyebab faktor utama yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.**

5.2 Saran

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah kedepannya harus dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar dapat mencapai target dengan membentuk tim khusus untuk mengontrol kinerja petugas bidang pajak maupun bisa membuat program yang

terhubung langsung dengan setiap server pegawai agar dapat memonitoring kinerja pegawai bagian bidang pajak, serta dalam menentukan target kedepannya harus lebih melihat dengan jumlah potensi yang sebenarnya agar dapat mencapai target.

2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah harus dapat mempertahankan jumlah kontribusi yang cukup besar dari pajak kendaraan bermotor bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan potensi yang ada dengan melakukan kegiatan yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajak, seperti adanya potongan pajak yang terutang atau dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak delivery order sehingga wajib pajak memudahkan wajib pajak yang malas keluar rumah maupun malas untuk mengantri.
3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah harus dapat meningkatkan kinerja petugas bagian penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan menambahkan jam kontrol sehari 3 kali maupun lebih dengan petugas yang berbeda-beda, dengan memberikan insentif bagi petugas yang dapat melampaui target penagihan tunggakan yang telah ditentukan agar petugas dapat lebih semangat dan maksimal dalam bekerja untuk mengingatkan wajib pajak agar segera membayarkan pajak terutang yang telah jatuh tempo dan bisa juga dengan meningkatkan target jumlah penagihan yang diterbitkan.

4. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah harus dapat meminimalkan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajak, seperti adanya potongan pajak atau diskon, tidak hanya itu pemerintah juga harus lebih banyak melakukan sosialisasi langsung baik di daerah perkotaan maupun pedesaan karena semua masyarakat juga perlu diberikan pemahaman terkait pentingnya membayarkan pajak tepat waktu.

